



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

**NOTULEN RAPAT
TIM PELAKSANA TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF**

Hari/ Tanggal	: Selasa, 11 Agustus 2015
Waktu	: 09.30 - 11.50 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Utama Lantai 4, Gedung A.A. Maramis II Kemenko Bidang Perekonomian, Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
Agenda	: 1. Progress Pengumpulan Laporan EITI 2012 dan 2013 2. Isu-isu Rekonsiliasi 3. Tindak Lanjut 4. Hasil Sementara Rekonsiliasi
Peserta Rapat	
Pemerintah & BUMN	: 1. Ditjen Keuangan Daerah diwakili : Yedi, Trisna dan Rezki 2. SKK Migas, diwakili : Selvi dan Betty 3. BUMN Pertamina diwakili oleh : Aji Supriyanto, Yohan Triskanto, Iswina Dwi
Asosiasi Industri dan Perusahaan	: 1. APBI – ICMA, diwakili : Supriatna Suhala 2. IMA, diwakili : Muhklis 3. Anggota APBI, diwakili: Dwi Buana Ishak
Masyarakat Sipil	: 1. PWYP, diwakili: Dewi. Y, Aryanto 2. NRGi, diwakili : Imanuel Bria 3. Article 33 Indonesia, diwakili : Chitra.R,
Bank Dunia	: 1. Noriko Toyoda
IA KAP SSS	: 1. Imam Sarwoko 2. Teuku Mirastra 3. Muhariyanto Askandar 4. Mulia Nasution 5. Dessi Yuliana

Sekretariat EITI : 1. Edi Effendi Tedjakusuma
2. Ronald Tambunan
3. Tri Wicaksono
4. Agus Trianto
5. Doni Erlangga
6. Yuliana

Pembukaan oleh Pak Montty : Menyampaikan Agenda Rapat yaitu progress pengumpulan Laporan EITI 2012 dan 2013 yang targetnya selesai pada bulan Oktober 2015. Mempersilahkan Pak Edi menyampaikan sambutan.

Pak Edi : Menyampaikan terkait dengan progress Inception Report. Rapat yang dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan persetujuan Inception Report secara formal, karena pada Rapat Tim Kecil tanggal 17 Juni 2015 telah disepakati dan Inception Report telah diselesaikan IA dan digunakan sebagai acuan penyusunan laporan. Salah satu yang telah disetujui Tim Kecil adalah mengenai MOMI dan MPN. Yang perlu dipublikasikan dalam laporan EITI 2012 dan 2013 adalah ketentuan umum dalam kontrak, penjelasan mengenai framework regulation.

Pak Iman : Ada 2 tugas IA yaitu pembuatan Inception Report dan Kontekstual Report. Pembuatan inception report telah diselesaikan sesuai persetujuan tim kecil yang merupakan bagian atau perwakilan dari MSG. Untuk Laporan Kontekstual sedang dalam proses dan telah sampai 70%. Untuk rekonsiliasi di bagi menjadi 2 yaitu Migas dan Minerba. Proses Rekonsiliasi Migas telah sampai 70%. Proses rekonsiliasi Minerba masih melakukan pengumpulan data dari Perusahaan maupun Pemerintah. Ada sedikit kesulitan dalam mendapatkan data dari Minerba, sehingga IA harus mencari sendiri data global dari Minerba yang harus dipilah terlebih dahulu sesuai tahun yang dibutuhkan yaitu 2012 dan 2013. Perusahaan yang telah memberikan laporannya baru sampai 50%.

Ibu Dessi : Menyampaikan progress laporan kontekstual yang bertujuan agar dapat dipahami struktur laporan yang harus sesuai dengan EITI Standard dan isu-isu yang ditemukan selama proses penulisan. IA berharap agar dari penjelasannya akan mendapatkan persetujuan dan saran dari isu-isu yang ditemukan maupun kegiatan-kegiatan yang IA sajikan di kontekstual. Menjelaskan struktur dari penulisan kontekstual. Ada beberapa tabel diantaranya adalah Bab, Daftar isi yang akan memenuhi EITI Standard, Progress Narrative (proses pencarian data, membuat tulisan tetapi belum ada review dari KPKB) dan untuk proses selanjutnya masih akan dikonfirmasi kepada instansi-instansi terkait.

Penjelasan pada Bab I yaitu mengenai ringkasan kontekstual, Bab II mengenai latar belakang, Bab III mengenai tata kelola industri ekstraktif di Indonesia yang isinya berupa hukum pertambangan Migas dan Minerba dan fungsi lembaga terkait, sistem kontrak bagi hasil, kontrak karya dan perijinan, reformasi atau perbaikan tata kelola, revisi UU Migas, MOMI, MPN, pertambangan minerba. Bab II akan memenuhi EITI Standard tentang Framework yang mengatur industri ekstraktif beserta perbaikannya (progress sudah sampai 90%).

Pada pertemuan dengan Tim Kecil pada 17 Juni 2015 ada usulan mengenai topik 'peraturan pelaksanaan UU 2009 tentang Minerba', IA mengusulkan untuk mengganti topik menjadi proses *clear and clean* di sektor pertambangan minerba, karena prosesnya masih berjalan dan 40% di Indonesia masih *non clear and clean*. Karena untuk peraturan pelaksana UU 2009 tentang minerba merupakan kegiatan yang sudah terjadi, dan bukan yang sedang berjalan

Tanggapan Pak Aryanto : Untuk memperkaya tulisan dalam kontekstual mengenai minerba bisa gunakan data presentasi Dirjen Minerba atau bisa juga di dapatkan di website KPK mengenai Minerba.

Tanggapan Bu Selvi : Sejak tahun 2013 setelah pembubaran ada beberapa hal mengenai tata kelola migas yang bisa diinformasikan termasuk beberapa terobosan mengenai Migas seperti peraturan-peraturan di sektor Migas.

Pak Edi : Dalam sub Bab ada terdapat mengenai reformasi tata kelola, akan meminta ke ESDM antara lain perubahan regulasi seperti lelang, program atau apakah ada perbaikan atau kenaikan produksi selama EITI diadakan. Dapat digunakan sebagai bahan untuk memperkaya kontekstual. Jika memungkinkan dapat dimintakan juga kepada KPK

Dessi : Bab IV akan membahas tentang proses tender kontrak *licensing* Migas dan Minerba, pengungkapan kontrak terkait dengan hukum di Indonesia, kadaster sistem di Indonesia, membahas mengenai UU atau peraturan yang mengatur tentang pemilik kontrak. EITI Standard dalam bab ini adalah tentang informasi *licensing* bagaimana proses dan registry-nya, *allocation of licensing*, *beneficial owner* dan kontrak.

Ada beberapa pending data pada Ditjen Migas yang pada tahun 2012 dan 2013 banyak mengeluarkan wilayah kerja. EITI Standard mengharuskan *list of applicants* dari Participating Interest. Dari Dirjen Migas masih ada pending publikasi karena terjadi jual-beli di Indonesia perpindahan pemilik Participating Interest 2012 dan 2013, belum mendapatkan data tersebut. Publikasi beserta tender dalam EITI Standard mengharuskan adanya informasi mengenai short applicant dan bid criteria yang kemungkinan ini tidak dapat dipublikasikan. Untuk isu yang lain mengenai kadaster dalam minerba ada publikasi mengenai MOMI, yang telah memenuhi EITI Standard. Permasalahannya adalah tidak dapat di akses oleh publik. Akan ke Dirjen Minerba untuk hal ini dan akan dibantu oleh Pak Bastian (Asdep Ekstraktif). Untuk migas informasi wilayah kerja Operator terdapat di laporan SKK migas tahunan, namun yang disarankan di EITI Standard adalah koordinat dan jumlah produksi. Dalam laporan SKK migas tahunan sudah ada juga peta wilayah kerja.

Pada EITI Standard 3.10 mempersilahkan jika MSG memiliki komentar tentang bagaimana efektif dan efisiensi proses *licensing* di Indonesia terutama kepada asosiasi-asosiasi yang ingin berkomentar tentang prosedur atau ada point yang harus diperbaiki. IA akan merangkum wilayah kerja pada tahun 2012 dan 2013, baik yang melalui lelang atau penawaran langsung. Wilayah kerja tahap I pada 2013 jumlah wilayah kerjanya ada 18, tetapi yang dimintai hanya ada 5

Bu Dessi : Standard EITI 3.11 tentang *beneficial ownership*. Tim kecil sudah memutuskan harus membahas mengenai bagaimana peraturan dan prakteknya di Indonesia pada tahun 2012 dan 2013. Mengenai peraturan *beneficial ownership* di Indonesia berdasarkan peraturan yang IA ketahui ada di peraturan Bapepam, tetapi hanya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek.

Format pelaporan sudah disepakati oleh Tim Kecil akan secara entities

Standard EITI 3.12 Tentang pengungkapan kontrak. Di Indonesia tidak ada peraturan yang mengharuskan melaporkan itu. Dan ada beberapa kontrak yang sudah di publis, tetapi dari LSM yang openoil.net baru migas yang sudah dipublikasikan. IA menemukan sequence legal event dari salah satu LSM, yang meminta BP Migas untuk kontrak PT Cevron. Untuk tahun 2012 meminta salinan kontrak kepada KIP (Komisi Informasi Publik). Dan atas keputusan abligasinya KIP memutuskan

bahwa kontrak tersebut adalah informasi terbuka sebagian. Pengecualiannya adalah terkait informasi lokasi seperti Nama Desa, Kecamatan dan jika dilihat dari pertimbangan KIP bahwa kontrak adalah kategori dana umum terdapat dilampiran B (kontrak bagi hasil). Kontrak tersebut tidak memiliki konsekuensi merupakan kinerja atau kemampuan finansial suatu perusahaan dan sepanjang kontrak tidak ada informasi. BP Migas mengajukan gugatan terhadap putusan KIP ke PN Jakarta Selatan, dan dimenangkan oleh BP Migas. Sehingga putusannya adalah bahwa kontrak merupakan atau bersifat privat atau perdata khususnya bagi yang membuat kontrak. Tahun 2013 KIP memohon kasasi ke MA, tetapi kasasi tersebut ditolak oleh MA. Kontrak tersebut hanya berlaku untuk PT Chevron

Tanggapan Bu Chitra (CSO) : Adanya keterbukaan mengenai situasi atau kesimpulan akhir mengenai pelaksanaan kontrak di Indonesia yang masih diperjuangkan.

Bu Dessi : Bab V Mengenai manajemen penerimaan negara industri ekstraktif, dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana proses penerimaan negara, apa saja yang diterima oleh negara dan di catat dimana. Mengenai pencatatan, proses akuntabilitasnya, penerimaan negara dibagi hasilkan ke daerah, proyeksi dari penerimaan negara. EITI Standard 3.2 mengenai fiscal regime akan menjelaskan jenis-jenis penerimaan negara dan aturannya

Untuk pending data CSO memberikan kebijakan khusus dari kabupaten bojonegoro, mengenai dana bagi hasil migas yang diterima dari kabupaten dan di distribusikan.

Tanggapan Pak Supriyatna (APBI) : Sistem penerimaan negara di Indonesia, tidak ada aturan dan seluruh penerimaan negara masuk kedalam satu rekening. Barulah di gunakan untuk pembangunan. Tidak seperti pada standard EITI, seluruh penerimaan dari pertambangan dapat dilihat penggunaannya. Dana jaminan proklamasi, uang perusahaan bukan uang negara tapi yang disandera pemerintah. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap negara, maka pemerintah akan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban perusahaan tersebut. Tapi selama perusahaan tersebut memenuhi kewajibannya dari tahun ke tahun maka uang perusahaan tersebut bisa dicairkan dan dikebalikan lagi ke perusahaan.

Bu Dessi : Untuk konteks di EITI standard ini agar laporan kontekstual meng-aditif mana saja revenue yang tidak di record di nasional. Jaminan reklamasi dari dirjen minerba tidak ditemukan berapa jumlahnya, bagaimana proses akuntabilitasnya. BPK banyak melakukan berbagai audit terhadap jaminan reklamasi untuk meng-aditif mana saja IUP yang tidak menyetorkan.

Tanggapan Bu Citra (CSO) : EITI Standard menggambarkan mengenai situasi industri ekstraktif di Indonesia yang merupakan penerimaan maupun yang bukan penerimaan. Cukup hanya menggambarkan situasi sistem yang ada di Indonesia. Kebijakan earmarking selain Bojonegoro, telah disepakati meng-highlight Aceh. Ekstra budgetary, banyak perda-perda menyepakati MOU antara perusahaan dan pemerintah daerah yang biasa disebut sebagai dana pihak ketiga terdapat di laporan World Bank (Bu Chitra akan memberikan link terkait), seperti di Kalimantan.

Bu Dessi : Bab VI akan membahas tentang gambaran industri ekstraktif, secara konteks global, industri migas, industri pertambangan minerba, kontribusi ekstraktif pada lapangan kerja, kegiatan informal dalam industri ekstraktif.

Pak Teuku Mirastra : Rapat tim pelaksana tanggal 12 Juli 2015 telah melaksanakan pembuatan template dan telah didistribusikan dan disosialisasikan kepada entitas-entitas pelapor (Perusahaan Minerba dan Migas) dan instansi Pemerintah. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 15-16 Juni 2015 (Minerba), serta Sosialisasi Migas dilaksanakan pada tanggal 8 Juli. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama dalam mengisi template yang telah disepakati oleh tim pelaksana.

Untuk yang Sektor Migas, Entitas pelapor yang telah didapatkan dari instansi pemerintah yaitu dari SKK Migas, Dirjen Migas, Dirjen Anggaran (PNBP) dan data-data ini yang akan rekonsiliasi dengan data-data dari perusahaan. Diluar itu ada 4 instansi pemerintah, yaitu Dirjen Pertimbangan Keuangan dan contoh 3 Provinsi daerah penghasil itu hanya Di disclose dari satu sisi saja dan tidak rekonsiliasi. Administrasi badan pemerintah untuk Migas ada 2 yang melapor dari operator pemegang PI (Participating Interest) yang ditunjuk sebagai wakil dari PI lainnya dan yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi Migas. Dan biasanya dalam satu blok ada kemungkinan yang non operator.

Dari 7 pelapor entitas pemerintah yang telah diterima adalah 4 pelapor dan data ini sudah bisa kita rekonsiliasi. Rekonsiliasi sudah daooat dikerjakan secara bertahap. Untuk KKKS yang operator sesuai scoping pada inception report yang disetujui 72 pelapor dari KKKS yang sudah eksplorasi dan produksi serta memberikan kontribusi pada penerimaan negara, sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015 sudah melapor 54 perusahaan dan 18 perusahaan yang belum melapor dengan persentase 75% untuk operator.

Untuk mendapatkan Informasi pajak di DJP (Direktorat Jenderal Pajak), harus menyertakan Lembar Otorisasi. Salah satu isu pada mlgas adalah perubahan jumlah perusahaan dari 97 menjadi 100 perusahaan dan akan terus bergerak karena mendapatkan data update dari laporan operator. Penambahan ini disebabkan ada penjualan perusahaan, pengganti kepemilikan dan berganti nama perusahaan.

Transportasi fee pada PT. Bukit Asam angkanya diatas 1% maka harus kita rekonsiliasi (sesuai EITI Standard).

Isu yang terdapat pada sektor Minerba adalah 7 perusahaan yang sudah tidak aktif. Dan ada beberapa perusahaan berdasarkan konfirmasi di identifikasikan ada 10 perusahaan yang enggan untuk melapor.

Pak Iman Sarwoko : Kesimpulan proses pada rekonsiliasi adalah 50%, terutama Minerba karena banyak perusahaan yang enggan melapor dan untuk Migas sudah hampir semuanya tinggal direkonsiliasi datanya. Masih banyak perbedaannya namun proses rekonsiliasi masih terus berjalan dan terus difollow up. IA berharap dari assosiasi Minerba (Pak Supriatna) bisa membantu segala hal yang berhubungan dengan Dirjen Minerba.

Pak Supriyatna : Akan membantu memberikan surat untuk perusahaan dan berharap agar IA dapat memberikan list nama perusahaan.

Bu Dewi : Bertanya mengenai data sheet yang dihasilkan dari rekonsiliasi agar dapat digunakan kembali oleh stakeholder yang lain.

Tanggapan Pak Tri Wicaksono : Rekonciler akan membuat summary data tersendiri yang sama dengan negara lain, jadi ada satu report yang akan diisi semuanya dan EITI Internasional sedang membuat satu sistem yang semua negara sama, tapi kalo untuk open data keseluruhan belum bisa dilakukan.

Pak Montty : Melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh pak tri, tim pelaksana akan meminta soft file tapi baru dapat tahun 2010 dan 2011 dan sedang dalam proses. Sedangkan tahun 2009 belum didapatkan, untuk agenda ketiga biasanya setiap tahun membuat laporan tahunan untuk tim pelaksana yang akan dilaporkan berdasarkan laporan tahun lalu. Deadline untuk menyelesaikan laporan kepada EITI Internasional berdasarkan kesepakatan awal adalah 1 Juli namun diberi waktu sampai akhir tahun.

Strange and weakness dalam pelaksanaan EITI, ini kekuatannya kita cantumkan informasi kontekstual dilaporan 2012&2013 dan sedang berjalan, kemudian kerjasama dari anggota tim

pelaksana, koalisi masyarakat sipil (CSO) yang mendukung EITI kemudian kerebisi perpres 26 tahun 2010 yang sedang dicetak dan terima kasih dengan tim pelaksana yang sudah memfasilitasi tim kecil dan ada 3 pemerintah daerah yang ikut serta dalam tim pelaksana. Weaknessnya antara lain tidak adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak melapor, rekapan data antara cash dan accrual yang tidak memasukkan beberapa informasi, laporan EITI masih sulit dipahami oleh masyarakat, dan berharap agar laporan 2012&2013 akan lebih baik karena adanya kontekstual, kemudian total pembiayaan yang tidak bisa dijelaskan tapi akan ada dalam laporan. Laporan tahunan ini bila sudah disetujui oleh tim pelaksana maka akan dijadikan laporan resmi EITI Indonesia kemudian akan disubmit pada EITI Internasional.

Usulan Bu Chitra : Cara sosialisasi EITI yang akan lebih baik jika bisa menyoroti hal-hal yang kritis dari laporan, yang belum efektif pada laporan tahun lalu.

Anggaran yang tercantum tentang honor tim pelaksana dan sebagian dari Tim Pelaksana tidak mengetahui persis tentang itu. Bisakah diberikan penjelasan tambahan bahwa mengenai mekanisme pemberian honor Tim Pelaksana untuk keperluan transparansi.

Di Ratimlak mana Work plan 2015 disahkan? Karena work plan dan budget merupakan titik penting, kegiatan- kegiatan apa saja terutama belajar dari proses yang lalu tentu ingin mengefektifkan sosialisasi laporan Sosialisasi yang mungkin perlu diperbaiki, seharusnya form EITI justru yang memancing perdebatan tentang masalah bukan hanya yang baik-baiknya (seperti: rekonsiliasinya yang beres) tapi justru yang masalah (seperti: dari sektor informal yang diduga 50%) seperti debat-debat itu yang penting dinaikkan kepada publik.

Berharap pada Ratimlak berikutnya bisa dibahas kembali karena anggarannya besar sekali, maka harus memberikan perhatian khusus bagaimana untuk mengefektifkan anggaran tersebut agar prosesnya jadi lebih baik.

Kemudian mengenai respond letter yang harus disiapkan untuk Board EITI dengan due date sekitar September 2015 dan akan lebih baik jika lebih pro aktif sambil menunggu rapat Board pada September 2015 karena harus menunjukkan bahwa Tim Pelaksana memiliki progress dan sudah menyiapkan respond letter untuk diberikan kepada Board EITI.

Pak Montty : Meminta pak Andi untuk mem-follow up berkaitan dengan sosialisasi dan akan di circulate work plan 2015, dan meminta agar usulan dapat diterima. Untuk respond letter akan disiapkan sebelum bulan September 2015 dan untuk form bisa Tim Kecil untuk membentuk bagaimana agar dapat menarik antusiasme masyarakat.

Masukan Bu Chitra : Sesuai yang sudah disepakati Tim Kecil mungkin bisa diaktifkan setiap bulan sekali untuk membahas remaining issue.

Pak Edi : Work plan tahun 2015, akan membuat FGD transparansi dan pertahanan nasional Tanggal 19-20 Agustus 2015. kemudian pada 26-28 Agustus 2015 akan mengadakan sosialisasi khususnya UU 23 di Yogyakarta (perusahaan di Kalimantan), Pada bulan September akan mengadakan planning jurnalis yang direncanakan akan diselenggarakan di Bogor, kemudian rencana strategic liquid tanggal 9-11 September 2015 di Bogor, Kemudian ada FGD yang sifatnya tematik tujuannya untuk memperluas diskusi diluar MSG sekaligus bisa melakukan debat publik melibatkan lebih banyak pihak untuk membahas topik-topik tertentu, yang Agustus tentang transparansi kemudian bulan September tentang SGA industri ekstraktif sekaligus akan membuat scoping untuk tahun 2015 dan meminta masukan dari beberapa pihak di daerah.

Kemudian Tanggal 20 September 2015 berharap draft report Independent Administrator telah selesai dan pada 28 September 2015 ada Ratimlak dan kemudian terakhir di akhir bulan September 2015 ada sosialisasi di Solo (Untuk perusahaan yang Non Kalimantan).

Bulan Oktober 2015 ada FGD teamnya adalah tentang kontribusi ekonomi industri ekstraktif sekaligus dengan FGD scoping, dan diharapkan tanggal 12 Oktober 2015 sudah ada Final report kemudian seminggu sesudahnya ada Ratimlak. Bulan November 2015 report sudah bisa launching sekaligus ada road table discussion dan rencananya akan disiarkan di Metro TV. Dari 3 kali FGD yang dilakukan berharap bulan November atau Desember 2015 akan membuat seminar tentang peran dari EITI pada tahun ini, jadi bisa ditarik dari 3 FGD itu menjadi seminar nasional.

Setelah launching harus mulai sosialisasi pertama kali yang kemungkinan akan dilaksanakan pada pertengahan November 2015, kemudian scoping 2016 akan direkap setelah ada beberapa kali scoping nanti di Jakarta apa saja yang akan dikerjakan dan dilakukan dilaporkan 2016. Pada akhir November 2015 dan scoping notenya harus selesai akhir November 2015 yang akan menjadi bahan untuk tender Administrator Independent.

Anggaran rencana penyerapannya hingga saat ini masih dibawah 20% dan diharapkan semua kegiatan berjalan maka grafik anggarannya akan mendekati 100% di Desember 2015 dari anggaran yang telah disediakan tahun 2015 dan untuk 2016 segera akan disiapkan, mungkin sekaligus dari usulan Bu Citra yang kegiatan tim kecil setiap bulan.

Masukan Bu Chitra : Tentang TOR-TOR setiap FGD, terutama mengenai tujuan memancing debat publik yang penting didalam EITI, kemudian mengenai pembahasan anggaran tentang honor yang arahnya bukan pada honor diluar kredit yang diberikan tapi lebih kepada masalah transparansi.

Laporan EITI tahun ketiga dan menjadi krusial jangan sampai mengalami kejenuhan, salah satu yang paling menarik dibicarakan yaitu keberadaan Phillipina yang masih baru dibanding Indonesia, namun mereka lebih cepat mengkontekstualisasikan laporan dengan perbaikan-perbaikan dalam laporannya. Dan kami dari CSO juga mohon ijin mengusulkan sharing diskusi diluar yang tadi tapi tentunya dengan disupport dana dan SDM yang dimiliki, dengan harapan EITI tidak hanya memproduksi report tetapi mendorong transparansinya di titik-titik mana (seperti transparansi pajak, transparansi kontrak). Berharap diadakannya diskusi tentang hal transparansi tersebut.

Pak Andi : Meminta agar Pak Edi dapat meng-incorporate masukan-masukan, kemudian juga melakukan Sosialisasi melalui berbagai media, FGD maupun Seminar-seminar Nasional.

Akhir kata Pak Andi menutup Ratimlak ini dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Tim Pelaksana.